

**ANALISIS YURIDIS UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK
PIDANA PERDANGAN ORANG TERKAIT PRAKTEK *COMERCIAL*
SURROGATE MOTHER DI INDONESIA**

Oleh

I Made Dwi Cahya Prayogi Putra, NIM 2214101142

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terkait frasa “dalam posisi rentan” dan “pemanfaatan organ tubuh untuk mendapatkan keuntungan” dalam hubungannya dengan praktik *surrogate mother* komersial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta menggunakan metode interpretasi gramatikal, historis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma tersebut mengandung kekaburan makna karena tidak memberikan batasan operasional yang jelas mengenai konsep kerentanan dan eksploitasi biologis. Secara historis, UU TPPO belum mengantisipasi perkembangan teknologi reproduksi seperti *surrogacy*, namun secara teleologis praktik *surrogate mother* komersial berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan martabat manusia yang menjadi dasar pembentukan UU TPPO. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui interpretasi yudisial maupun pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci: TPPO, kekaburan norma, *surrogate mother*, eksploitasi, posisi rentan

**ANALISIS YURIDIS UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK
PIDANA PERDANGAN ORANG TERKAIT PRAKTEK *COMERCIAL*
SURROGATE MOTHER DI INDONESIA**

By

Ketut Ayu Asiti Sari, NIM 2214101033

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the normative ambiguity in Article 1 paragraph (7) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, particularly concerning the phrases “position of vulnerability” and “exploitation of body organs for profit” in relation to commercial surrogacy practices in Indonesia. This normative legal research applies statutory, conceptual, and comparative approaches using grammatical, historical, teleological, and comparative interpretation methods. The findings reveal that the provision contains normative ambiguity due to the absence of clear operational definitions regarding vulnerability and biological exploitation. Historically, the law did not anticipate developments in reproductive technology such as surrogacy; however, from a teleological perspective, commercial surrogacy potentially contradicts the objective of protecting human dignity underlying the anti-trafficking law. Therefore, normative clarification through judicial interpretation or legislative reform is necessary to ensure legal certainty and the protection of human dignity.

Keywords: *human trafficking, normative ambiguity, commercial surrogacy, exploitation, vulnerability.*